



PRIORITAS SOLUSI PERMASALAHAN PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA (PENDEKATAN *ANALYTIC NETWORK PROCESS*)

Nurul Muna Zahra Prabu, Hulmansyah, Nurul Huda

zahraprabu@gmail.com

Program Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI

Abstract

Received: 30 Juni 2017

Final Accepted: 7 July 2017

Published Online: 31 July 2017

Keywords:

Priority Issues, Solutions, Increased Investment, Analytic Network Process

Corresponding Authors:

*** Nurul Muna Zahra Prabu**

This research has a purpose: 1) analyze significant problems in order to be studied by BKPM in-depth to increase investment in Indonesia; And 2) Analyze solutions in order to be reviewed by Investment Coordinating Board in-depth to increase investment in Indonesia. This research is a qualitative research that transformed into quantitative research with Analytic Network Process (ANP). ANP in methodology, the data is used is primary Data Obtained from in-depth interviews with two investors and one person from BKPM who have an understanding of the problem Discussed. Data is ready if the ANP are variable and respondents' assessment of the problem the which is the object of research in numerical scale. The results of this study indicate that the priority issue of increasing investment in Indonesia is a political condition that is less supportive. Two informants from investors have the same priority to determine the problems in increasing investment in Indonesia, one person from Investment Coordinating Board has a priority issue of increasing investment in Indonesia is the complexity of licensing. The priority of solutions in increasing investment in Indonesia is to increase legal certainty and simplify licensing and non-licensing procedures for investment starting from priority sectors and territories. This solution is a priority for two informants from investors.

Copyright JEBA 2017., All rights reserved

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan: 1) Menganalisis permasalahan-permasalahan yang signifikan dalam rangka yang perlu dikaji oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) secara mendalam guna meningkatkan penanaman modal di Indonesia; dan 2) Menganalisis solusi dalam rangka yang perlu dikaji oleh BKPM secara mendalam guna meningkatkan penanaman modal di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang ditransformasi menjadi penelitian kuantitatif dengan metode *Analytic Network Process* (ANP). Dalam metodologi ANP, data yang digunakan merupakan data primer yang didapat dari hasil wawancara (*in-depth interview*) dengan dua orang investor dan satu orang dari BKPM yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas. Data siap olah dalam ANP adalah variabel-variabel penilaian responden terhadap masalah yang menjadi objek penelitian dalam skala numerik. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa prioritas masalah peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah kondisi politik yang kurang mendukung. Dua informan dari investor memiliki prioritas yang sama untuk menentukan permasalahan dalam peningkatan penanaman modal di Indonesia, satu orang dari BKPM memiliki prioritas masalah peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah rumitnya perizinan. Prioritas solusi dalam meningkatkan penanaman modal di Indonesia adalah meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan nonperizinan penanaman modal dimulai dari sektor dan wilayah prioritas. Solusi ini menjadi prioritas bagi dua orang informan dari investor.

Kata Kunci : Prioritas Masalah, Solusi, Peningkatan Penanaman Modal, *Analytic Network Process*

PENDAHULUAN

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanam modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri, sedangkan Penanam Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (*Investment Coordinating Board/BKPM*) sebagai penanggung jawab layanan perizinan dan investasi di pemerintah pusat terus berbenah sejalan dengan usaha-usaha pemerintahan untuk semakin meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya dalam bidang investasi yang diharapkan akan semakin meningkatkan animo pelaku investasi baik pelaku usaha nasional maupun investor dari luar negeri. Berbagai usaha yang dilakukan oleh BKPM antara lain telah melakukan terobosan seperti layanan izin investasi online, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pusat, tertulis soal amanat meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Hal ini dijabarkan dalam program kunci meningkatkan pembangunan infrastruktur dan memperbaiki iklim investasi

Ada beberapa *milestone* capaian BKPM yang layak diketahui oleh masyarakat, khususnya investor, terutama langkah reformasi layanan perizinan investasi. Pada 15 Desember 2014 jajaran BKPM memulai dengan peluncuran layanan perizinan investasi

secara *online*. Melalui layanan ini, investor dapat mengajukan perizinan investasi dari mana saja dan kapan saja. Badan Koordinasi Penanaman modal bersama Kementrian dan lembaga lainnya, berhasil meluncurkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat, yang diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 26 Januari 2015.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berusaha secara terus menerus melakukan terobosan-terobasan baik dalam berbagai macam peraturan dan kebijakan-kebijakan, dalam hal ini adalah merupakan usaha yang berkaitan secara signifikan dengan promosi-promosi yang dilaksanakan secara terus menerus guna meningkatkan animo dunia usaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia baik dunia usaha internasional maupun nasional, namun demikian semua hal ini dilaksanakan dengan berbagai macam tantangan-tantangan dan pertanyaan yang mendasar.

Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu :

1. Apakah permasalahan-permasalahan yang signifikan dalam rangka yang perlu dikaji oleh BKPM secara mendalam guna meningkatkan penanaman modal di Indonesia ?
2. Apakah solusi dalam rangka yang perlu dikaji oleh BKPM secara mendalam guna meningkatkan penanaman modal di Indonesia ?

KAJIAN TEORI

Promosi

Promosi merupakan arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran (Swastha dan Handoko, 2011). Moore (2005) bahwa Promosi adalah aktivitas-aktivitas atau peristiwa-peristiwa yang direncanakan untuk menjamin dukungan atau pengakuan tentang diri seseorang, produk, lembaga atau gagasan. Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk tersebut akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya.

Strategi Promosi

strategi promosi merupakan tindakan perencanaan, implementasi, dan pengendalian komunikasi dari organisasi kepada pelanggan atau audiens sasaran (*target audiences*) lainnya. Strategi promosi mengkombinasikan periklanan (*advertising*), penjualan personal (*personal selling*), promosi penjualan (*sales promotion*), publisitas dan hubungan masyarakat (*publicity and public relations*), dan pemasaran langsung (*direct marketing*) dalam suatu program terkoordinasi untuk berkomunikasi dengan pembeli dan pihak lainnya yang mempengaruhi keputusan pembelian. Aktivitas promosi memberikan pengaruh yang penting untuk keberhasilan penjualan perusahaan (Purnama, 2002).

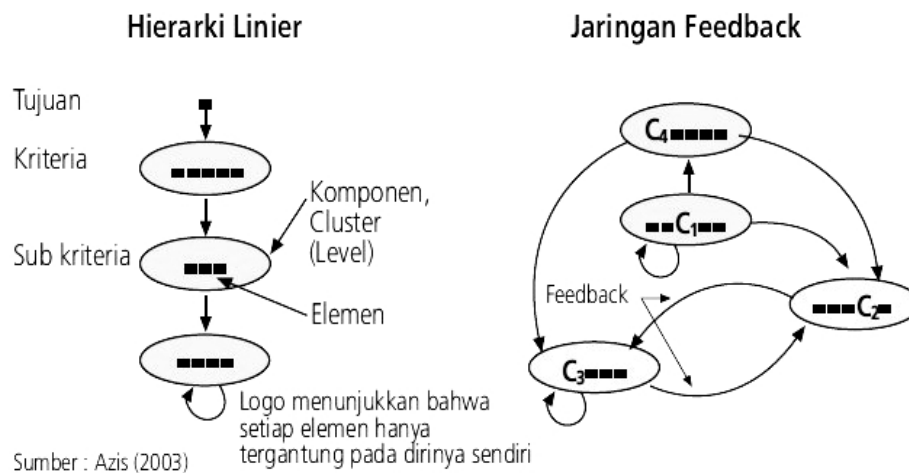
Bauran Promosi

Bauran promosi (*promotion mix*) perusahaan merupakan paduan khusus iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi, dan sarana pemasaran langsung yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai pelanggan secara meyakinkan dan membangun hubungan pelanggan (Kotler dan Armstrong, 2010).

Assauri (2013) bauran promosi (*promotion mix*) perusahaan merupakan strategi yang dijalankan perusahaan, yang berkaitan dengan penentuan bagaimana perusahaan menyajikan penawaran produk pada segmen pasar tertentu, yang merupakan sasaran pasarnya.

Analytic Network Process (ANP)

Ascarya (2005) menjelaskan, ANP merupakan pendekatan baru dalam proses pengambilan keputusan yang memberikan kerangka kerja umum dalam memperlakukan keputusan-keputusan tanpa membuat asumsi-asumsi tentang independensi elemen-elemen pada level yang lebih tinggi dari elemen-elemen pada level yang lebih rendah dan tentang independensi elemen-elemen dalam suatu level. ANP menggunakan jaringan tanpa harus menetapkan level seperti pada hierarki yang digunakan dalam *Analytic Hierarki Process* (AHP) yang merupakan titik awal ANP. Konsep utama dalam ANP adalah *influence* (pengaruh), sedangkan konsep utama dalam AHP adalah preferensi '*preference*'.



Sumber: Ascarya, (2005)

Gambar 1. Perbedaan Hierarki dan Jaringan

Pada jaringan AHP (Gambar 1) terdapat level tujuan, kriteria, subkriteria, dan alternatif, dimana masing-masing alternatif memiliki elemen. Sementara itu, pada jaringan ANP, level dalam AHP disebut cluster yang dapat memiliki kriteria dan alternatif di dalamnya, yang sekarang disebut simpul.

Feedback, alternatif-alternatif dapat bergantung/terikat pada kriteria seperti pada hierarki tetapi juga bergantung/terikat pada sesama alternatif. Lebih jauh lagi, kriteria-kriteria itu sendiri dapat tergantung pada alternatif-alternatif dan pada sesama kriteria. Sementara itu, *feedback* meningkatkan prioritas yang diturunkan dari *judgements* dan membuat prediksi menjadi lebih akurat. Hasil dari ANP diperkirakan akan lebih stabil. Dari jaringan *feedback* pada gambar 1 dapat dilihat bahwa simpul atau elemen utama dan simpul-simpul yang akan dibandingkan dapat berbeda pada cluster-cluster yang berbeda. Sebagai contoh, ada hubungan langsung dari simpul utama C_4 ke *cluster* lain (C_2 dan C_3) yang merupakan *outer dependence*. Sementara itu, ada simpul utama dari simpul-simpul yang akan dibandingkan berada pada cluster yang sama, sehingga cluster ini terhubung dengan dirinya sendiri dan membentuk hubungan *loop*. Hal ini disebut *inner dependence*. Prinsip dasar ANP yaitu ada tiga, yaitu dekomposisi, penilaian komparasi (*comparative judgements*), dan komposisi hierarkis atau sintesis dari prioritas. Prinsip dekomposisi digunakan untuk menstrukturkan masalah yang kompleks menjadi kerangka hierarki atau

jaringan cluster, subcluster, sub-subcluster dan seterusnya. Dengan kata lain, dekomposisi adalah memodelkan masalah ke dalam kerangka ANP.

Prinsip penilaian komparasi (*comparative judgements*) diterapkan untuk membangun perbandingan pasangan (*pairwise comparison*) dari semua kombinasi elemen-elemen dalam *cluster* dilihat dari *cluster* induknya. Perbandingan pasangan ini dilakukan untuk mendapatkan prioritas lokal dari elemen-elemen dalam *cluster* dilihat dari *cluster* induknya.

Sedangkan prinsip komposisi hierarkis atau sintesis diterapkan untuk mengalikan prioritas lokal dari elemen-elemen dalam *cluster* dengan prioritas ‘global’ dari elemen induk, yang akan menghasilkan prioritas global seluruh hierarki, dan menjumlahkannya untuk menghasilkan prioritas global untuk elemen level terendah (biasanya merupakan alternatif).

Penelitian Terdahulu yang terkait

Beberapa penelitian terkait yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| Nama peneliti, Tahun | Judul | Hasil |
|-------------------------|--|--|
| Yanti, 2008 | Penetapan prioritas strategi multi-fokus aplikasi Sand Cone Model di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) | Kesimpulan yang dapat diambil adalah strategi meningkatkan kepastian hukum dan pemulihan kepercayaan dunia usaha, meningkatkan koordinasi teknis dengan instansi terkait, meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, memenuhi SOP secara optimal, dan menyusun arah pengembangan modal merupakan lima prioritas strategi teratas dengan persentase masing-masing >5%. Dalam pembentukan sand cone model, yang menjadi tingkatan result/goal adalah Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Tujuan Investasi yang Menarik. Sedangkan yang menjadi Basic Pillar adalah yang memiliki bobot prioritas yang lebih tinggi (dua pertiga keseluruhan strategi) dengan nilai kumulatif sampai dengan 63%, dan sisanya menjadi Operating Philosophies yang memiliki bobot prioritas yang lebih rendah (sepertiga keseluruhan strategi). |
| Agustini, (2010) | Analisis Strategi Pemasaran Kawasan pelabuhan Bebas dan | Menganalisis faktor-faktor yang menjadi Ancaman, Peluang, kelemahan, dan Kekuatan KPBPB Batam dan menjadikannya dasar dari |

| | | |
|--|---|--|
| | Perdagangan Bebas Batam dalam Meraih Investasi Asing | <p>strategi pemasaran yang meliputi segmentasi pasar (<i>segmenting</i>), menetapkan target pasar (<i>targeting</i>), dan membuat posisi yang unik (<i>positioning</i>) dalam persepsi pasar yang ditarget, juga taktik pemasaran yang meliputi diferensiasi, bauran pemasaran dan penjualan.</p> <p>Dengan segmen investor yang disasar adalah Singapura, Jepang, Amerika, dan China, dan didukung sumber daya berkualitas yang berasal dari universitas terkemuka di Indonesia</p> |
| Rarasati, (2013) | Pelaksanaan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dibidang Penanaman Modal Pada BKPM Provinsi DI Yogyakarta | <p>Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa mekanisme pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap bidang penanaman modal asing maupun dalam negeri dalam kepengurusannya dilakukan di BKPM Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menggunakan sistem PTSP. Pelaksanaannya mengikuti prosedur pendaftaran, proses permohonan izin untuk usaha penanaman modal dan proses penerimaan atau penolakan izin yang dilakukan di BKPM Daerah Istimewa Yogyakarta. Iklim investasi setelah diberlakukan sistem PTSP mengalami kenaikan dan sangat berpengaruh pada jumlah investasi dan pelaku usaha yang menanamkan modal. Kemudian mengenai kendala yang dihadapi adalah terdiri dari faktor internal yaitu kendala dari dalam lembaga dan faktor eksternal yang disebabkan dari luar lembaga. Dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007</p> |
| Harahap (2014) | Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal | <p>Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal yang diterapkan di BKPM Provinsi Sumatera Barat tidak sama dengan pola pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM Provinsi Sumatera Utara. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sumatera Barat lebih tertinggal karena proses perizinan tidak langsung dilayani di dalam satu gedung yang sama</p> |
| Lubis, Firdaus, Sasongko (2015) | Faktor Faktor yang Mempengaruhi Investasi | <p>Ketiga prioritas strategi untuk meningkatkan investasi asing langsung pada sektor</p> |

| | Asing Langsung pada Sektor Perkebunan di Indonesia | perkebunan di Indonesia yakni dengan melakukan harmonisasi perundang undangan baik pemerintah pusat maupun daerah. |
|------------------------|---|--|
| Nurmilah (2016) | Pengaruh Penanaman Modal Asing Dan Human Capital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: 33 Provinsi Di Indonesia) | Hasil analisis pengaruh penanaman modal asing dan kualitas sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan hasil yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari nilai r^2 yang mencapai 99%. Selain itu, aspek human capital mempunyai efek yang sangat krusial dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari variabel lama sekolah signifikan berpengaruh besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. |

Penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal metode penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode *Analytic Network Process* (ANP) dengan melakukan observasi langsung serta melakukan *indepth interview*. Inilah yang menjadi nilai lebih dari penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya.

Kerangka Pikir

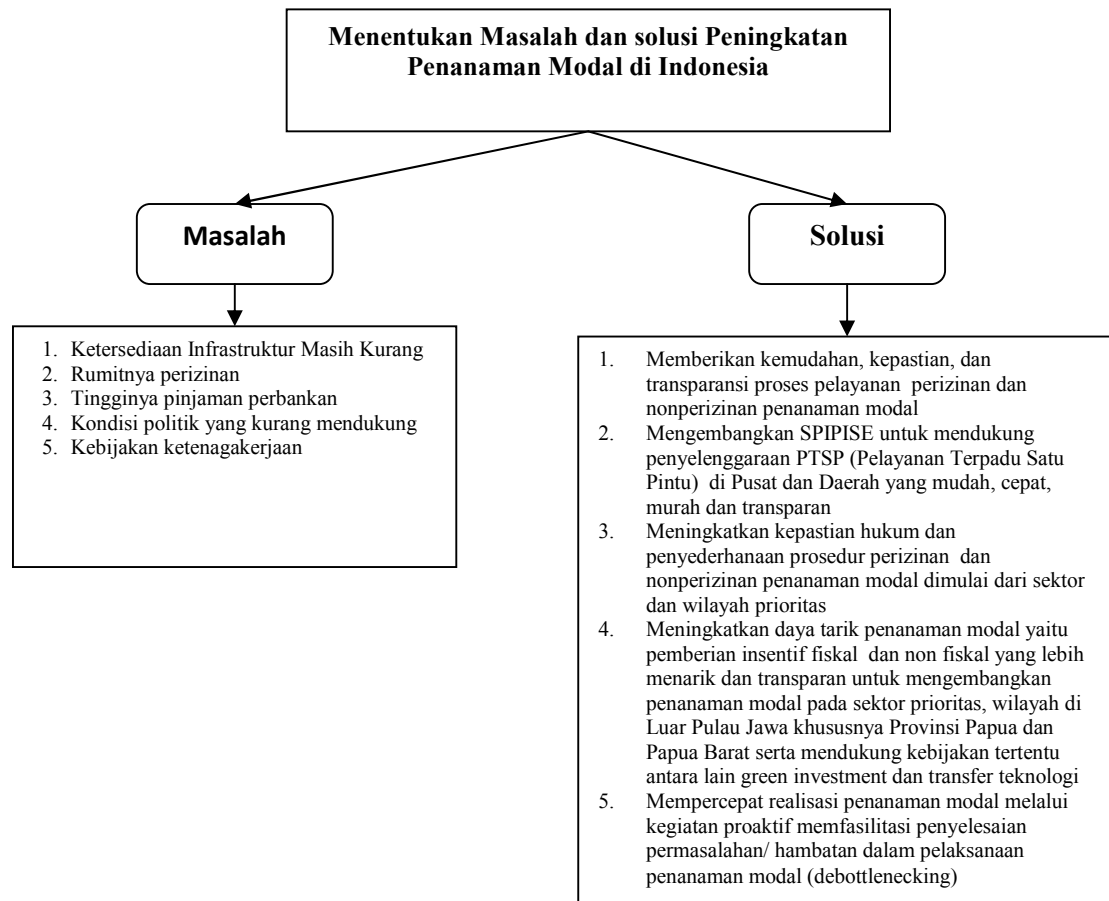
BKPM sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam rangka merumuskan kebijakan langkah-langkah untuk menarik investor asing menanamkan modalnya ke dalam negeri, maka BKPM membuat kebijakan strategi baik dalam bentuk regulasi maupun promosi.

Dalam hal regulasi dirumuskan adanya berbagai kemudahan-kemudahan perijinan bagi investor asing yang akan menanamkan modalnya didalam negeri, pemangkasan dan percepatan proses perijinan serta pelayanan satu atap, sehingga proses lebih mudah dan lebih cepat.

Kemudian untuk strategi promosi, dirumuskan berbagai kegiatan untuk menarik investor dengan melakukan bauran promosi, antara lain melalui periklanan, penjualan/promosi perorangan melalui lembaga perwakilan perdagangan Indonesia di Luar negeri, promosi penjualan/kemudahan investasi dan hubungan kemasyarakatan. Berbagai media periklanan digunakan baik media masa maupun elektronik. Tujuan akhir dari promosi adalah untuk memberikan kesan kepada para investor bahwa investasi di

Indonesia itu layak dan aman.

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang ditransformasi menjadi penelitian kuantitatif dengan metode *Analytic Network Process* (ANP). Data yang digunakan data primer yang didapat dari hasil wawancara (*in-depth interview*) dengan para ahli yang kompeten yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas. Data siap olah dalam ANP adalah variabel-variabel penilaian responden terhadap masalah yang menjadi objek penelitian dalam skala numerik.

Informan Penelitian

Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan secara *purposive sample* (sengaja) dengan mempertimbangkan pemahaman informan tersebut terhadap Masalah dan solusi Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia.

Jumlah informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang, dengan pertimbangan bahwa mereka cukup berkompeten dalam mewakili keseluruhan populasi. Dalam analisis ANP jumlah informan tidak digunakan sebagai validitas. Syarat informan yang valid dalam ANP adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Oleh karena itu, informan yang dipilih dalam survei ini adalah Pejabat BKPM, Ahli yang memahami tentang sistem BKPM dan yang mewakili investor

Metode Pengolahan Data

Hasil *survey* yang diperoleh diolah terlebih dahulu per masing-masing individu informan dengan menggunakan software ANP *Super Decision*. Data yang diolah dari masing-masing responden tersebut menghasilkan dua supermatriks yang memberikan urutan prioritas aspek-aspek terpenting dan masalahnya, alternatif pemecahan masalah yang tepat menurut masing-masing informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prioritas Permasalahan Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia

Pada penelitian prioritas solusi permasalahan peningkatan penanaman modal di Indonesia, menunjukan bahwa dari ketiga responden yang diteliti atau yang menjadi narasumber menunjukan bahwa ada beberapa masalah dalam peningkatan penanaman modal di Indonesia.

Tabel 2. Prioritas Permasalahan Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia

| ASPEK | Indra Prasad | Yus'an | Riyatno | mean | RA |
|--|--------------|---------|---------|---------|----|
| 1. Tingginya pinjaman perbankan | 0.06307 | 0.05875 | 0.04613 | 0.05598 | 4 |
| 2. Ketersediaan Infrastruktur Masih Kurang | 0.30693 | 0.39073 | 0.20875 | 0.30214 | 2 |
| 3. Rumitnya perizinan | 0.08461 | 0.06874 | 0.62245 | 0.25860 | 3 |

| | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|
| 4. | Kondisi politik yang kurang mendukung | 0.49278 | 0.43666 | 0.08203 | 0.33716 | 1 |
| 5. | Kebijakan ketenagakerjaan | 0.05262 | 0.04513 | 0.04064 | 0.04613 | 5 |
| Nilai W | | 0,82 | | | | |

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan Tabel 2 meskipun terdapat perbedaan pendapat antara para responden mengenai prioritas atas permasalahan peningkatan penanaman modal di Indonesia, ketiganya masih memiliki tingkat kesepakatan yang cukup tinggi. Menurut Indra Prasad dari PT Maniri Dirakja yang menjadi permasalahan utama dalam penanaman modal di Indonesia adalah Kondisi politik yang kurang mendukung. Informan dari PT Indo Green Power yang diwakili oleh Yus'an juga menyatakan bahwa prioritas masalah dalam penanaman modal di Indonesia adalah Kondisi politik yang kurang mendukung. Perwakilan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal yaitu Riyatno menyatakan bahwa masalah utama dalam peningkatan penanaman modal adalah Rumitnya perizinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa masalah utama dalam peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah kondisi politik di Indonesia yang kurang mendukung, sehingga secara rata rata prioritas masalah utama ada pada aspek Kondisi politik yang kurang mendukung. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Indra Prasad:

...Kaitan dengan politik berkaitan dengan kondisi keamanan. Sebab, kalau politik timbulnya gonjang ganjing seperti demo dan segala macam, ya investor akan menunggu dulu...

Pernyataan Indra Prasad di atas menunjukkan bahwa kondisi politik berkaitan dengan keamanan. Jika kondisi politik yang dapat menimbulkan gonjang ganjing seperti demo dan segala macam, maka investor akan menunda investasinya di Indonesia.

Prioritas masalah kedua adalah Ketersediaan infrastruktur yang masih kurang. Ketiga informan memiliki kesepahaman bahwa masalah kedua dalam peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah Ketersediaan infrastruktur yang masih kurang. Yus'an selaku Director PT. Indo Green Power menyatakan bahwa :

...nah tentu yg penting disini adalah ketersediaan infrastruktur karena itu langsung menyebabkan biaya, cost terhadap investasi itu...

Pernyataan Yus'an di atas menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur menyebabkan biaya terhadap investasi. Jika infrastruktur masih kurang misalnya jalan, maka investor perlu mengeluarkan biaya untuk pengadaan jalan tersebut. Biaya yang timbul diluar biaya operasional investor.

Prioritas masalah ketiga dalam peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah rumitnya perizinan. Informan dari perusahaan atau pengguna memiliki persepsi yang sama, bahwa rumitnya perizinan itu bukanlah masalah utama. Sementara informan dari pemerintah memiliki persepsi yang berbeda, rumitnya perizinan menurut pemerintah merupakan masalah utama dalam peningkatan penanaman modal.

Riyatno selaku kepala pusat bantuan hukum BKPM menyatakan bahwa :

...saya rasa kalau yg paling urgen, ibaratnya kalau paling mudah rumitnya perizinan. Kalau itu dipermudah itu sangat membantu sekali...

Pernyataan Riyatno di atas menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah rumitnya perizinan. Kalau perizinan dipermudah itu sangat membantu dalam peningkatan penanaman modal di Indonesia.

Masalah tingginya pinjaman perbankan dalam penelitian ini merupakan masalah tingginya bunga pinjaman di perbankan. Semua informan dalam penelitian ini memiliki kesepahaman yang sama bahwa masalah tingginya bunga pinjaman perbankan khususnya bank di Indonesia bukanlah masalah utama dalam peningkatan penanaman modal di Indonesia. Tingginya bunga pinjaman di perbankan khususnya di Indonesia merupakan masalah ke empat dalam penelitian ini. Indra Prasad menyatakan bahwa :

...investor sbkm melangkah menanamkan modalnya di negara manapun dia harus siap dengan dana yang bunganya rendah. Kalau di Indonesia bunganya tinggi...

Pernyataan Indra Prasad dari PT. Maniri Dirakja menunjukkan bahwa investor lebih tertarik dengan bunga rendah. Jika bunga pinjaman pada suatu negara dimana investor mau berinvestasi berbunga tinggi, maka investor tersebut tidak akan pinjam dana di bank tersebut. Seperti di Indonesia, karena Indonesia memiliki bunga yang tinggi, maka investor asing tidak ada yang meminjam ke bank di Indonesia, tapi bank di negara asalnya atau negara lain yang memiliki bunga yang lebih rendah.

Masalah dalam peningkatan penanaman modal di Indonesia yang tidak terlalu penting khususnya dalam penelitian ini adalah masalah kebijakan ketenagakerjaan. Persepsi informan dari perusahaan atau pengguna maupun pemerintah memiliki persepsi

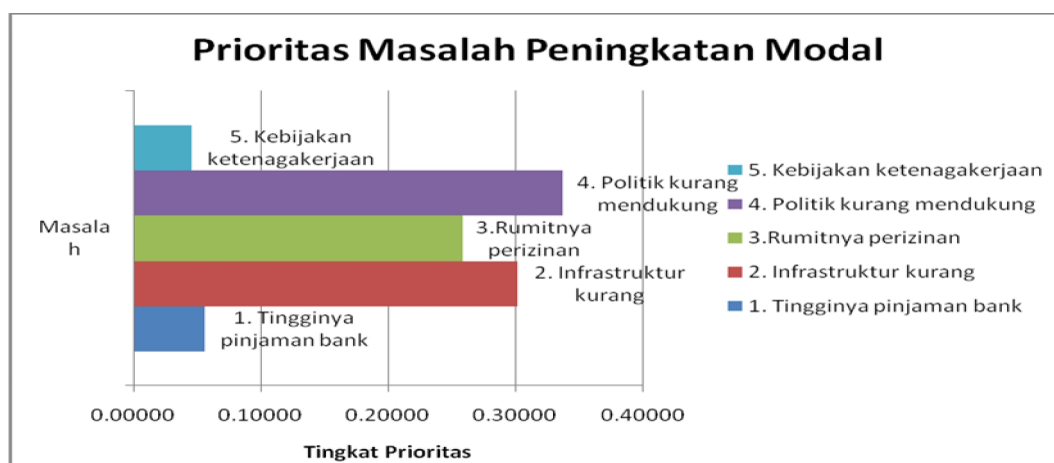
yang sama, bahwa kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini tidak menyulitkan investor dari asing. Peraturan terbaru ketenagakerjaan berkaitan dengan penghapusan Rasio Jumlah TKA Dengan Tenaga Kerja Lokal. Dalam Pasal 3 Permenaker 16/20015 diatur bahwa perusahaan yang mempekerjakan 1 (satu) orang TKA harus dapat menyerap sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang tenaga kerja lokal pada perusahaan yang sama. Memang ada pengecualian atas rasio ini jika TKA tersebut akan dipekerjakan untuk posisi tertentu, untuk pekerjaan yang sifatnya darurat dan mendesak, untuk pekerjaan yang sifatnya sementara, dan/atau untuk usaha jasa impresariat. Pasal 3 Permenaker 16/2015 ini dihapuskan oleh Permenaker 35/2015. Penghapusan pasal ini artinya menghapuskan aturan mengenai rasio jumlah TKA dengan tenaga kerja lokal. Sehingga bagi investor kebijakan ketenagakerjaan saat ini bukan menjadi masalah utama untuk berinvestasi di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Riyatno Kepala Pusat Bantuan Hukum BKPM, sebagai berikut :

... Sekarang sudah tidak ada kewajiban 1 banding 10, kalau dulu ada 1 orang tenaga kerja asing indonesia 10 orang. Kalau skrg tidak ada, sehingga menguntungkan bagi PMA...

Pernyataan Riyatno tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan saat ini bukanlah menjadi masalah dalam peningkatan penanaman modal di Indonesia.

Pernyataan Riyatno tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan saat ini bukanlah menjadi masalah dalam peningkatan penanaman modal di Indonesia (Gambar 4).



Sumber : Hasil Pengolahan Data

Gambar 4. Prioritas Masalah Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia

Gambar 4 menunjukkan bahwa prioritas masalah yang utama ada pada aspek Kondisi politik kurang mendukung. Prioritas masalah yang kedua sampai kelima berturut-turut adalah ketersediaan infrastruktur yang masih kurang, rumitnya perizinan, tingginya bunga pinjaman bank, dan kebijakan ketenagakerjaan.

Prioritas Solusi Permasalahan Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia

Pendapat ketiga informan diatas dirata-ratakan akan menunjukkan prioritas solusi dari permasalahan peningkatan penanaman modal di Indonesia.

Tabel 3. Prioritas Solusi Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia

| ASPEK | Indra Prasad | Yus'an | Riyatno | mean | RA |
|--|--------------|---------|---------|---------|----|
| 1. Mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Pusat dan Daerah yang mudah, cepat, murah dan transparan | 0,04549 | 0,04816 | 0,25115 | 0,11493 | 3 |
| 2. Memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal | 0,16540 | 0,29971 | 0,57316 | 0,34609 | 2 |
| 3. Meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan nonperizinan penanaman modal dimulai dari sektor dan wilayah prioritas | 0,50714 | 0,54936 | 0,08611 | 0,38087 | 1 |
| 4. Meningkatkan daya tarik penanaman modal yaitu pemberian insentif fiskal dan non fiskal yang lebih menarik dan transparan untuk mengembangkan penanaman modal pada sektor prioritas, wilayah di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat serta mendukung kebijakan tertentu antara | 0,19288 | 0,07561 | 0,05854 | 0,10901 | 4 |

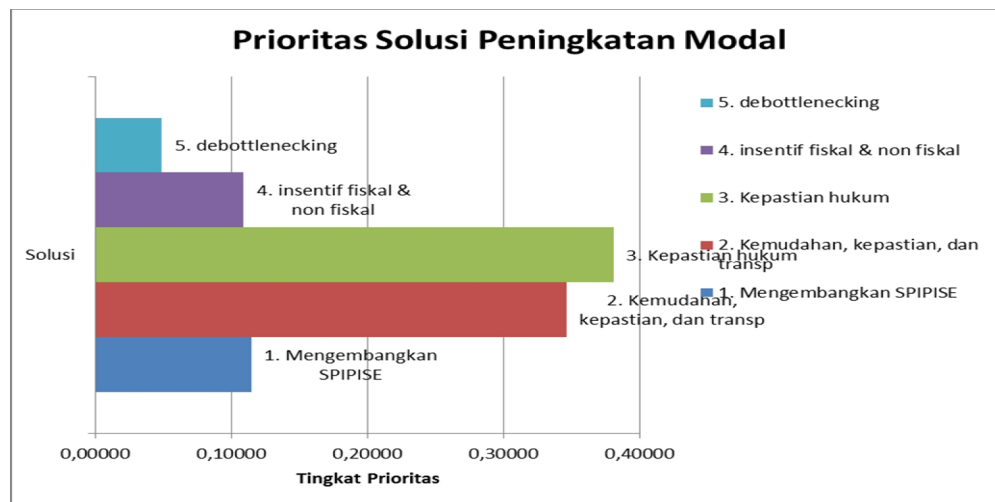
| | | | | |
|---|-------------|---------|---------|---------|
| lain green investment dan transfer teknologi | | | | |
| 5. Mempercepat realisasi penanaman modal melalui kegiatan proaktif memfasilitasi penyelesaian permasalahan/ hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal (<i>debottlenecking</i>) | 0,08909 | 0,02716 | 0,03104 | 0,04910 |
| | | | | 5 |
| Nilai W | 0,60 | | | |

Sumber : Hasil Penelitian, Diolah

Berdasarkan Tabel 3. meskipun terdapat perbedaan pendapat antara para responden mengenai prioritas atas solusi dari permasalahan peningkatan penanaman modal di Indonesia, ketiganya masih memiliki tingkat kesepakatan yang cukup tinggi.

Nilai rata-rata tingkat prioritas solusi dari permasalahan peningkatan penanaman modal di Indonesia dapat diketahui bahwa prioritas solusi yang harus dilaksanakan adalah Meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan nonperizinan penanaman modal dimulai dari sektor dan wilayah prioritas. Dua orang informan mewakili investor memiliki persamaan solusi, bahwa solusi utama dalam mengatasi permasalahan peningkatan penanaman modal adalah Meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan nonperizinan penanaman modal dimulai dari sektor dan wilayah prioritas.

Solusi utama yang kedua dalam permasalahan peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah Memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal. Setelah Memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal baru diikuti dengan Mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Pusat dan Daerah yang mudah, cepat, murah dan transparan. Solusi-solusi ini bukan tidak penting, namun yang lebih di prioritaskan adalah Meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan nonperizinan penanaman modal dimulai dari sektor dan wilayah prioritas, bahwa perlu adanya kepastian hukum dalam pengelolaan penanaman modal di Indonesia, dimulai dari kepastian hukum dalam pengurusan perizinan.



Gambar 5. Prioritas Solusi Peningkatan Penanaman Modal

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berkaitan dengan permasalahan dan solusi dalam peningkatan penanaman modal di Indonesia. Setelah dilakukan wawancara dan pengisian kuesioner pada informan penelitian, maka data dari kuesioner diolah dengan menggunakan analisis ANP software super decision.

Hasil pengolahan data menggunakan software super decision dan wawancara dapat diketahui prioritas-prioritas dari masalah dan solusi peningkatan penanaman modal di Indonesia. Prioritas masalah atau masalah utama peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah Kondisi Politik yang kurang mendukung. Ketiga informan memiliki tingkat kesepahaman yang tinggi dalam menentukan prioritas masalah peningkatan penanaman modal di Indonesia.

Hasil penelitian sesuai juga dengan penelitian yang dilakukan Lubis *et.al* (2015), bahwa ketiga prioritas strategi untuk meningkatkan investasi asing langsung pada sektor perkebunan di Indonesia yakni dengan melakukan harmonisasi perundang undangan baik pemerintah pusat maupun daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lubis *et.al* (2015) menunjukkan bahwa kondisi politik di Indonesia belum mendukung investasi terlihat dari hasil penelitian tersebut perlu adanya harmonisasi perundang-undangan baik pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini untuk mengatasi peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah meningkatkan kepastian hukum dan

penyederhanaan prosedur perizinan dan nonperizinan penanaman modal dimulai dari sektor dan wilayah prioritas. Ketiga informan masih memiliki kesepahaman yang tinggi, walaupun ada 1 orang yang berbeda persepsinya mengenai prioritas solusi peningkatan penanaman modal di Indonesia.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Karyuliati dan Yanti (2008). Hasil penelitian yang dilakukan Karyuliati dan Yanti (2008) adalah strategi meningkatkan kepastian hukum dan pemulihan kepercayaan dunia usaha, meningkatkan koordinasi teknis dengan instansi terkait, meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, memenuhi SOP secara optimal, dan menyusun arah pengembangan modal merupakan lima prioritas strategi teratas dengan persentase masing-masing >5%. Dalam pembentukan *sand cone model*, yang menjadi tingkatan result/goal adalah Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Tujuan Investasi yang Menarik. Sedangkan yang menjadi *Basic Pillar* adalah yang memiliki bobot prioritas yang lebih tinggi (dua pertiga keseluruhan strategi) dengan nilai kumulatif sampai dengan 63%, dan sisanya menjadi Operating Philosophies yang memiliki bobot prioritas yang lebih rendah (sepertiga keseluruhan strategi)

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan Harahap (2014). Hasil penelitian Harahap (2014) bahwa pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal yang diterapkan di BKPM Provinsi Sumatera Barat tidak sama dengan pola pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM Provinsi Sumatera Utara. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sumatera Barat lebih tertinggal karena proses perizinan tidak langsung dilayani di dalam satu gedung yang sama. Hasil penelitian ini menjadi solusi dari hasil penelitian yang dilakukan Harahap (2014), bahwa kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting dilakukan sehingga perbedaan-perbedaan kebijakan dalam proses perizinan investasi di Indonesia dapat dikurangi. Sehingga investor tertarik menanamkan dananya di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan pada Bab 4, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Prioritas masalah yang signifikan dalam rangka yang perlu dikaji oleh BKPM secara mendalam guna meningkatkan penanaman modal di Indonesia adalah Kondisi politik yang kurang mendukung. Dua informan memiliki prioritas yang sama untuk

menentukan permasalahan dalam peningkatan penanaman modal di Indonesia, satu informan memberi prioritas masaah berbeda yaitu rumitnya perizinan

2. Prioritas solusi dalam rangka yang perlu dikaji oleh BKPM secara mendalam guna meningkatkan penanaman modal di Indonesia adalah meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan nonperizinan penanaman modal dimulai dari sektor dan wilayah prioritas. Ada 2 informan yang memiliki prioritas solusi yang sama yaitu informan dari investor, sementara informan dari BKPM memberi prioritas solusi berupa memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Tina Murti, 2010 Analisis Strategi Pemasaran Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Dalam Menarik Investasi Asing, *Tesis Fakultas Ilmu Ekonomi* Program Magister Manajemen Jakarta
- Ascarya. (2005).“*Analytic Network Process (ANP) Pendekatan Baru Studi Kualitatif*”. Makalah disampaikan pada Seminar Intern Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Trisakti, Jakarta
- Assauri, Sofjan. 2013. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : Rajawali Pers
- Harahap, Ferry Jeremia, 2014. Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta
- Kotler, P dan Armstrong. 2010. *Principles of Marketing, thirteen edition*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Lubis, Rizky P., Muhammad Firdaus, Hendro Sasongko. 2015. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung Pada Sektor Perkebunan Di Indonesia, *Jurnal Bisnis & Manajemen*, 2015, Vol. Xvi, No. 2, 80-89
- Nurmilah, Risma, 2016. Pengaruh Penanaman Modal Asing Dan Human Capital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: 33 Provinsi Di Indonesia) *jurnal ilmiah Ilmu Ekonomi* Vol. 5 Edisi 9, Okt 2016
- Purnama, C.M Lingga. 2002. *Strategic Marketing Plan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Rarasati, Endang. 2014. Pelaksanaan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp) Di Bidang Penanaman Modal Pada Bkpm Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=59981
- Swastha Basu, Hani Handoko. 2011. *Manajemen Pemasaran-Analisis Perilaku Konsumen*. Yogyakarta : BPFE.
- Yanti, Tri, Karyuliati, 2007, Penetapan prioritas strategi multi-fokus aplikasi Sand Cone Model di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Tesis Magister Manajemen UGM